

Indonesia Economic and Development Outlook 2026

**Dinamika Global dan Regional serta Implikasinya bagi
Ekonomi Indonesia 2026**Deddy S. Bratakusumah^{1*}¹ Universitas Esa Unggul, JakartaKorespondensi: ^{1*} deddy.supriady@esaunggul.ac.id <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.536> | halaman: 16 – 30**Abstrak**

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstelasi global dan regional yang semakin kompleks dan dinamis. Memasuki tahun 2026, perekonomian dunia dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, fragmentasi geopolitik, pergeseran kebijakan moneter global, serta transisi menuju tatanan multipolar yang mengubah pola perdagangan, investasi, dan arus keuangan internasional. Artikel ini menganalisis Outlook Ekonomi Indonesia 2026 dengan menempatkan Indonesia dalam konteks konstelasi global dan regional Asia Timur dan Pasifik. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif berbasis data makroekonomi, laporan lembaga internasional, serta telaah kebijakan dan dinamika geopolitik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tekanan eksternal meningkat—termasuk perlambatan ekonomi global, proteksionisme, dan ketidakpastian kebijakan moneter—Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5 persen, inflasi yang terkendali, dan fondasi makroekonomi yang relatif kuat. Peran konsumsi domestik, investasi, hilirisasi komoditas, serta kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif menjadi faktor utama daya tahan tersebut. Namun demikian, ketergantungan pada komoditas, volatilitas harga global, serta risiko fragmentasi perdagangan tetap menjadi tantangan struktural. Artikel ini menegaskan pentingnya kebijakan yang responsif dan terkoordinasi, baik di tingkat domestik maupun regional, agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang global sekaligus memitigasi risiko eksternal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada 2026 dan seterusnya.

Kata Kunci: konstelasi global; dinamika regional; Outlook ekonomi Indonesia 2026; fragmentasi geopolitik; ketahanan ekonomi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

I. Pendahuluan

Salah satu aspek penting yang tidak dapat dihindari dalam melakukan analisis situasi dan kondisi ekonomi suatu negara adalah konstelasi Global dan Regional. Suatu negara akan senantiasa berinteraksi dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi; politik, ekonomi dan sosial bahkan budaya dari suatu kawasan atau regional ataupun secara global. Indonesia sebagai suatu negara yang menerapkan politik bebas dan aktif tidak akan luput dari fenomena global dan regional. Juga sebaliknya Indonesia pun menjalankan perannya dalam konteks regional dan global yang memengaruhi perekonomian negara negara lain.



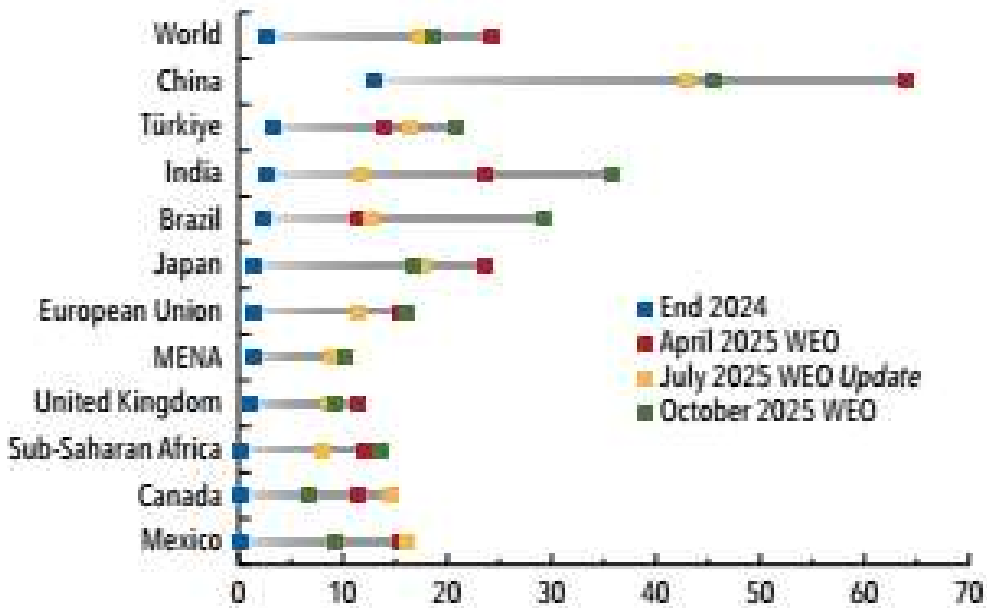
Gambar 1. Indonesia dalam Konstelasi Global dan Regional

Sumber Peta: Ontheworldmap.com

Konstelasi global maupun regional ada yang berlangsung atau terjadi secara formal maupun secara alami. Secara formal konstelasi ini merujuk pada kerangka kerjasama organisasi, atau institusi, di dalam suatu kawasan. Kolaborasi secara formal dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai capaian bersama, baik itu politik, sosial maupun ekonomi bahkan pertahanan dan keamanan. Tujuan kolaborasi mencakup beberapa aspek, diantaranya; pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemakmuran serta kesejahteraan sosial. Kolaborasi formal yang terjadi pada galibnya tanpa hierarki yang tegas. Struktur kolaborasi hanya menekankan pada interaksi dinamis di tengah globalisasi.

Setidaknya sejak tahun 1992, Indonesia telah melakukan lebih dari 40 perjanjian perdagangan dengan beberapa negara baik secara bilateral ataupun secara multilateral. Diantaranya, The ASEAN Framework Agreement on Trade in Services (AFAS) diberlakukan pada saat the ASEAN Summit di Bangkok pada bulan December 1995. Indonesia dengan Japan juga telah menanda tangani the Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2008. Selain itu, perdagangan antara China and Indonesia terus meningkat volume dan nilainya, utamanya setelah penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang mulai berlaku sejak awal 2010.

Konstelasi non formal merupakan dampak dari dikeluarkannya kebijakan oleh satu atau beberapa negara yang memengaruhi kegiatan-kegiatan serta volume dan nilai perdagangan antara negara tersebut dengan negara-negara mitra dagangnya. Indonesia pun tidak akan terlepas dari pengaruh fenomena ini. Misalnya saja kebijakan tarif Amerika Serikat pada tahun 2025, yang tertuang di dalam President's 2025 Trade Policy Agenda, telah membuat beberapa negara yang tercantum di dalam kebijakan tersebut menjadi panik, termasuk Indonesia.



Gambar 2. Besaran Tarif Amerika Kepada Beberapa Negara

Sumber: IMF, 2025

Lebih jauh lagi, kondisi dan konstelasi geopolitik saat ini ditandai oleh transisi menuju multipolaritas, yang didorong oleh persaingan kekuatan besar, kebangkitan "Global Selatan," (Global South) dan peningkatan pengamanan teknologi dan sumber daya. Fenomena ini melibatkan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, di samping meningkatnya peran kekuatan regional. Pergeseran signifikan ditandai dengan munculnya negara-negara Global Selatan, seperti India, Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan yang bertindak sebagai aktor independen yang memiliki pengaruh yang semakin besar dalam tatanan global. Belakangan invasi Amerika Serikat ke Venezuela dengan dalih menangkap presidennya yang dituduh sebagai teroris narkotik (narcoterrorism), merupakan wujud dari kebijakan luar negeri tanpa etika (Unethical Policy). Meskipun alasan sebenarnya adalah untuk membendung eskalasi pengaruh China dan Rusia di Venezuela yang kaya minyak.

Di dalam makalah ini ditelaah ihwal outlook Ekonomi Indonesia 2026 sehubungan dengan konstelasi global dan regional yang terkait dengan; perlambatan ekonomi global dan fragmentasi geopolitik, arah kebijakan moneter global dan implikasinya bagi negara berkembang, dinamika kawasan Asia Timur dan Pasifik, serta posisi dan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

II. Perlambatan Ekonomi Global dan Fragmentasi Geopolitik

Perlambatan ekonomi global diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2026, dengan perkiraan yang menunjukkan bahwasanya pertumbuhan akan turun menjadi 2,9-3,3% di tengah ketidakpastian perdagangan dan perubahan kebijakan dari beberapa Negara serta organisasi multilateral. Fragmentasi geopolitik yang terjadi juga akan memperburuk keadaan ini dengan dampak pada terganggunya rantai pasokan, menurunnya FDI, dan meningkatnya proteksionisme.

Tabel 1. Pertumbuhan Global Menurut Beberapa Institusi

Institusi	Pertumbuhan 2025	Pertumbuhan 2026 (Prediksi)
OECD	2.9-3.2%	2.9-3.1%
IMF	3.2-3.3%	3.1-3.3%
World Bank	-	3.1%

Sumber: OECD, IMF dan World Bank

Perlambatan didorong antara lain dengan penerapan tarif oleh AS yang tinggi untuk beberapa negara saingannya, selain itu juga melemahnya perdagangan, dan penurunan pasar properti di negara-negara utama seperti Tiongkok telah memperlambat momentum perekonomian. Pertumbuhan PDB AS berpotensi turun setengahnya. Risiko inflasi dari permintaan infrastruktur AI dan tekanan pada penggunaan energi hijau telah menambah tekanan pada kondisi ekonomi global. Pasar negara berkembang akan menghadapi penurunan FDI lebih dari 15% sejak tahun 2021 hal ini terjadi karena berbagai negara menjalankan prinsip kehati-hatian.

Ketegangan geopolitik, termasuk persaingan antara AS-Tiongkok dan sanksi yang dilakukan kedua negara tersebut, telah memfragmentasi keuangan dan perdagangan secara global. Kondisi ini dalam skenario yang paling pesimis, akan dapat merugikan 0,4-1% dari PDB dunia pada tahun 2027 atau hingga \$5,7 triliun. FDI yang baru juga akan mengalami penurunan hampir dua pertiga.

Fragmentasi geopolitik pada gilirannya akan mengganggu rantai pasokan global, wujud nyata dari fragmentasi ini dilakukan dengan mendorong proteksionisme, hambatan perdagangan, dan kesepakatan berbasis kepentingan kelompok (bilateral maupun multilateral). Penerapannya akan menyebabkan biaya lebih tinggi, penundaan kegiatan, dan penurunan efisiensi. Para pelaku bisnis akan meresponsnya antara lain dengan regionalisasi dan diversifikasi, tetapi risiko yang berkepanjangan akan menambah kerentanan, antara lain kekurangan pasokan dan inflasi.

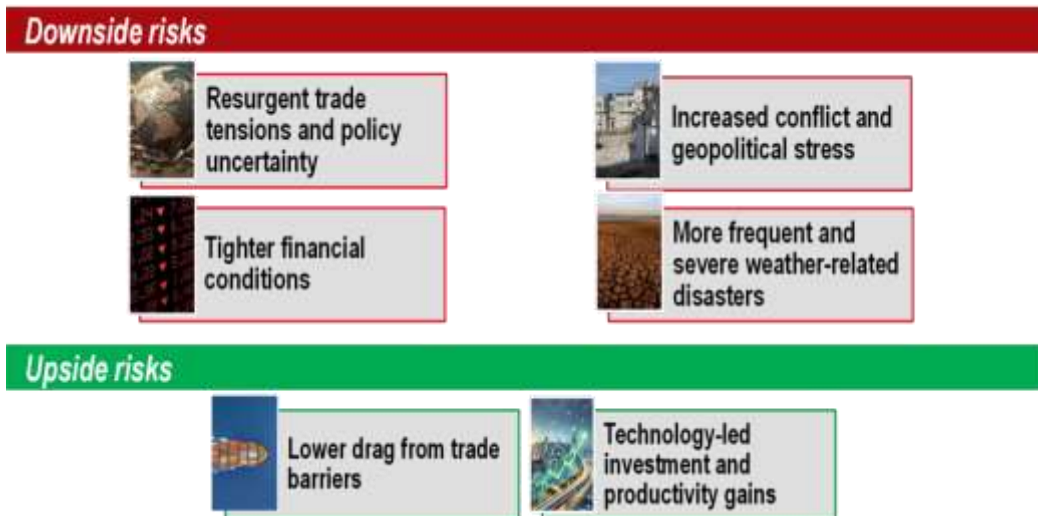
Langkah-langkah proteksionis seperti tarif dan sanksi pembatasan arus komoditi, akan menciptakan kekurangan input bagi suatu kegiatan atau industri dan akan memaksa pengalihan rute atau melakukan penimbunan yang akan berakibat pada penambahan biaya yang tidak kecil. Jalur utama perdagangan menghadapi hambatan akibat adopsi teknologi yang tidak merata dan penundaan pembangunan infrastruktur akibat kondisi fiskal di negara yang bersangkutan. Fragmentasi dan konflik antar kelompok negara juga akan mengikis kepercayaan pada multilateralisme, merusak jalur perdagangan dan memperburuk efek berantai di seluruh kegiatan perekonomian global.

Sebagai gambaran, EU telah mengalami peningkatan kerugian hampir 12% dari GDP akibat pembatasan arus imigrasi, arus modal dan teknologi. Karenanya industri yang memanfaatkan semikonduktor dan perakitan mobil telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat tidak stabilnya pasokan.

Langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi fragmentasi harus berfokus pada koordinasi multilateral, reformasi yang disepakati bersama, dan penguatan jaring pengaman keuangan global untuk melawan hambatan fragmentasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga interoperabilitas sambil mengatasi masalah kesinambungan dan keamanan interaksi ekonomi global. Langkah yang dapat dilakukan meliputi; merancang kebijakan yang tepat, dengan menerapkan analisis berbasis data dan panduan yang jelas untuk meminimalkan dampak yang tidak diinginkan. Selain itu juga harus dibangun konsultasi publik dengan swasta agar terwujud transparansi dalam perumusan dan penentuan kebijakan ekonomi yang memengaruhi perekonomian secara global.

Dalam kaitan ini OECD telah mendesak untuk dilakukan dialog agar dapat menjaga pasar tetap terbuka, menghindari kenaikan tarif yang memperburuk perlambatan. Pelonggaran moneter yang waspada di mana inflasi terkendali, dipadukan dengan manajemen utang akibat defisit fiskal. Lebih jauh lagi, IMF menekankan perumusan dan penerapan kebijakan perdagangan yang stabil untuk ketahanan terhadap risiko iklim dan keamanan.

Namun demikian menurut World Bank resiko dan fenomena yang akan mempengaruhi konstelasi global dan regional diperkirakan ada yang cenderung menurun dan ada yang akan menaik. Kedua gejala ini harus menjadi perhatian bagi pengambil keputusan diberbagai negara termasuk Indonesia.



Gambar 3. Gobal Downside and Upside Risks

Sumber: Word Bank, 2026

III. Arah Kebijakan Moneter Global dan Implikasinya bagi Negara Berkembang

Kebijakan moneter global bergeser ke arah pelonggaran, dengan bank sentral utama seperti Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa memangkas suku bunga di tengah pendinginan inflasi, sementara negara-negara berkembang menghadapi efek limpahan pada aliran

modal dan mata uang. Kecenderungan ini mendukung pertumbuhan global tetapi menimbulkan tantangan bagi negara-negara berkembang yang sensitif terhadap guncangan eksternal. Implikasi bagi negara-negara berkembang termasuk pertumbuhan yang moderat di samping peluang dari suku bunga global yang lebih rendah.

Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) memangkas suku bunga pinjaman dana federal menjadi 3,50% - 3,75% pada akhir tahun 2025, dan memproyeksikan satu pemangkasan lagi pada tahun 2026. Hal ini dilakukan karena inflasi mereda menjadi 2,5% akibat dari komponen pengeluaran konsumsi perseorangan (PCE), kebijakan ini dapat dianggap mendekati netral di tengah melemahnya permintaan tenaga kerja di AS. Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga depositonya menjadi sekitar 2% pada pertengahan tahun 2025 dan menerapkan pendekatan 'menunggu perkembangan yang terjadi', dengan mengharapkan inflasi inti akan menurun lebih lanjut dengan pertumbuhan yang didukung oleh permintaan domestik. Secara keseluruhan, siklus pelonggaran global yang dilakukan oleh negara-negara maju terus berlanjut, diantaranya bank-bank seperti Bank of Canada dan Bank of England juga memangkas suku bunga sebesar 0,75% - 1,00.



Gambar 4. Suku Bunga Pada Beberapa Negara Maju

Sumber: IMF, 2025

Pelonggaran oleh negara-negara maju meningkatkan arus masuk modal ke negara-negara berkembang melalui imbal hasil global yang lebih rendah, membantu pembayaran utang tetapi berisiko menyebabkan apresiasi mata uang yang merugikan ekspor. Pertumbuhan di pasar negara berkembang diproyeksikan melambat di bawah 4% pada tahun 2026, turun dari angka tertinggi pasca-COVID, karena memudarnya dukungan fiskal, arus yang bergejolak, dan dampak penerapan kebijakan tarif AS. Pengendalian inflasi membaik seiring dengan disinflasi global, tetapi ekonomi yang bergantung pada komoditas menghadapi risiko dari hambatan perdagangan dan munculnya kebijakan domestik yang lebih ketat.

Bank sentral di negara berkembang dapat memperoleh kembali otonomi kebijakan moneter dengan menerapkan instrumen makroprudensial, meningkatkan independensi

kelembagaan, dan mengadopsi rezim nilai tukar fleksibel untuk meredam dampak global. Reformasi kebijakan yang memperkuat independensi bank sentral (CBI) akan mengurangi pertumbuhan uang yang berlebihan dan meningkatkan kredibilitas, terutama di lingkungan negara-negara yang sedang menerapkan demokrasi dengan tingkat utang yang tinggi. Rezim fleksibel dan manajemen arus modal lebih lanjut akan dapat melindungi kebijakan domestik dari guncangan ekonomi negara maju.

Reformasi yang meningkatkan CBI secara hukum, seperti memperpanjang masa jabatan gubernur dan membatasi pinjaman pemerintah, meningkatkan disiplin moneter dengan mengekang ekspansi inflasi, dengan efek yang akan dirasakan dalam jangka panjang. Bank sentral memperoleh otonomi melalui mandat yang jelas untuk stabilitas keuangan, independensi dari campur tangan politik, dan akuntabilitas melalui laporan stabilitas keuangan. Tata kelola demokrasi harus memperkuat manfaat dari independensi Bang Sentral, dan mencegah pembalikan reformasi.

Kebijakan makroprudensial seperti batasan rasio pinjaman terhadap nilai (*loan-to-value caps*), penyangga modal kontra-siklikal, dan persyaratan cadangan mengendalikan lonjakan kredit dan volatilitas aliran modal tanpa bertentangan dengan tujuan moneter. Memberikan kewenangan kepada bank sentral dalam kerangka kerja ini, seperti di Indonesia dan Filipina, memanfaatkan keahlian mereka untuk pemantauan risiko sistemik. Instrumen yang menargetkan leverage, ketidaksesuaian likuiditas, dan eksposur mata uang mempertahankan ruang kebijakan di tengah siklus pelonggaran global.

Langkah-langkah lainnya sebagai pelengkap antara lain dengan membangun infrastruktur data sebagai bahan untuk indikator peringatan dini dalam membantu tindakan tepat waktu terhadap kerentanan. Koordinasi fiskal, melalui aturan utang, mencegah dominasi atas kebijakan moneter, terutama pada rasio utang terhadap PDB yang tinggi. Tekanan antar-wilayah di kawasan untuk melakukan reformasi akan mendukung pencapaian kemandirian yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter yang tidak konvensional (UMP), seperti pelonggaran kuantitatif (QE) oleh bank sentral negara maju, mendorong lonjakan aliran modal masuk ke pasar berkembang (EM) melalui imbal hasil yang lebih rendah dan penyeimbangan kembali portofolio, tetapi pembalikan selama pengetatan kebijakan domestik memicu aliran keluar dan volatilitas. Dampak limpahan ini memperkuat ledakan keuangan, apresiasi mata uang, dan ekspansi pinjaman di EM, dengan efek yang lebih kuat di ekonomi yang terintegrasi secara finansial. Selama pelonggaran QE, EM menghadapi pengurangan modal, imbal hasil yang lebih tinggi, dan tekanan nilai tukar, seperti yang terlihat pada pengetatan European Central Bank (ECB) pada tahun 2022.

Kebijakan QE Fed dan ECB pasca-2008 mendorong aliran masuk ekuitas dan utang ke EM dengan menekan premi risiko global dan mengarahkan kembali aliran pencarian imbal hasil, meningkatkan aliran masuk ekuitas EM secara signifikan. Pengetatan kebijakan moneter domestik sebesar 100 bps di negara-negara berkembang menarik tambahan arus masuk sebesar 0,2% dari PDB, tetapi guncangan UMP dari AS memperkuat hal ini melalui tekanan imbal hasil global, yang lebih menguntungkan arus perbankan dan portofolio daripada FDI. Dampak limpahan ini meningkatkan harga aset domestik, pertumbuhan kredit, dan tekanan neraca transaksi berjalan di negara-negara berkembang penerima.

Pengetatan yang tidak konvensional, seperti pengurangan aset dalam neraca dan kenaikan suku bunga, telah mendorong pembalikkan arus dana, sehingga menyebabkan arus keluar portofolio pasar negara berkembang yang tajam. Buktinya pada tahun 2022 ketika kenaikan suku bunga ECB, telah menyebabkan penurunan modal non-residen dan volatilitas. Kekhawatiran

normalisasi AS pada tahun 2013 (taper tantrum) dan kejutan baru-baru ini telah mengurangi arus masuk pasar negara berkembang, mendepresiasi mata uang dan meningkatkan imbal hasil lebih banyak di pasar negara berkembang yang terbuka.

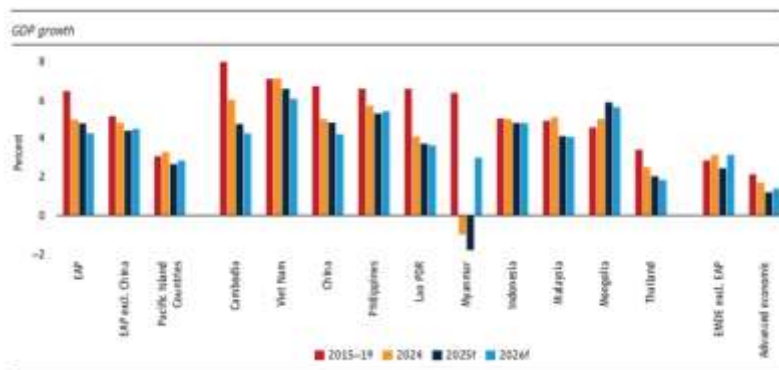
Negara berkembang, dengan kepemilikan asing yang tinggi dalam utang atau ekuitas, rekening modal terbuka, dan keterkaitan Euro, menghadapi risiko yang lebih besar dari pergeseran UMP dari ECB maupun Fed. Responsnya meliputi instrumen makroprudensial untuk mengekang arus masuk dan cadangan untuk arus keluar, mengurangi lonjakan pinjaman dan penghentian mendadak. Analisis terbaru mengkonfirmasi guncangan UMP AS menyebar melalui saluran perbankan ke negara berkembang seperti Indonesia, yang mengakibatkan perlunya penyangga atau jarring pengaman.

Prospek Indonesia terkait dengan kebijakan moneter global telah direspons oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berencana melakukan pemangkasan suku bunga BI lebih lanjut pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan, bersamaan dengan ekspansi likuiditas pro-pasar dan stabilisasi rupiah melalui intervensi. Hal ini sejalan dengan inflasi yang terkendali dan pasar uang yang lebih dalam, meskipun ketidakpastian global seperti perbedaan kebijakan Fed memerlukan langkah-langkah makroprudensial yang sangat waspada dan hati-hati. Selain itu juga akan diterapkan kebijakan yang lebih longgar, dengan menargetkan kredit ke sektor-sektor prioritas, meningkatkan ketahanan di tengah dampak eksternal.

IV. Dinamika kawasan Asia Timur dan Pasifik

Kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) menampilkan interaksi kompleks antara perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan upaya kelembagaan menuju integrasi. Dinamika utama meliputi persaingan AS-Tiongkok, sengketa Laut Cina Selatan, dan meningkatnya pengaruh Rusia, di samping dorongan ASEAN untuk mencapai hasil ekonomi yang nyata. Faktor-faktor ini membentuk lanskap ketahanan di tengah gejolak pada awal tahun 2026.

Pertumbuhan PDB di EAP melebihi rata-rata global tetapi melambat menjadi sekitar 4,0-4,5% pada tahun 2025-2026, dengan ekspansi Tiongkok turun dari 4,8% menjadi 4,2%. Wilayah lainnya mengantisipasi pertumbuhan 4,4-4,5%, sementara Kepulauan Pasifik memproyeksikan 2,7-2,8%, didorong oleh penurunan inflasi, kebijakan yang mendukung, dan peluang domestik seperti transformasi digital. Tantangannya termasuk saling ketergantungan perdagangan yang berubah menjadi alat tawar-menawar selama ketegangan.



Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi di Negara Negara EAP

Sumber: World Bank, 2025

Upaya AS untuk melawan Tiongkok menciptakan aliansi yang sekaligus menstabilkan dan menegangkan hubungan, yang diperumit oleh hubungan militer Rusia dengan Tiongkok dan Korea Utara. Sengketa Laut Cina Selatan menghambat finalisasi kode etik ASEAN pada tahun 2026 karena ketidaksepakatan tentang legalitas dan kegiatan seperti latihan bersama. Tekanan lintas selat terhadap Taiwan meningkat melalui tindakan barbagai tekanan tanpa perang.

Beberapa gejala perkembangan eksternal akan memengaruhi kinerja ekonomi di kawasan ini; peningkatan pembatasan perdagangan, meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan global. Pada saat yang sama, pilihan kebijakan domestik, terutama ketergantungan di beberapa negara pada stimulus fiskal daripada reformasi struktural, kemungkinan akan membentuk hasil pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Respons kebijakan di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) pada tahun 2025 menekankan reformasi struktural untuk mengatasi stagnasi produktivitas dan paradoks lapangan kerja, dengan fokus pada modal manusia, persaingan, dan infrastruktur. Bank Dunia menyoroti reformasi yang lebih berani daripada stimulus fiskal untuk membuka investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi sambil menyelaraskan keterampilan yang dimiliki sector swasta dengan peluang yang muncul.

Rekomendasi Bank Dunia mencakup investasi dalam modal manusia (HC) melalui pendidikan, perawatan kesehatan, pelatihan, dan keterampilan teknologi untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi di tengah AI dan otomatisasi. Kebijakan harus meningkatkan peluang ekonomi melalui infrastruktur di sektor transportasi, energi, dan digital, bersamaan dengan mempromosikan masuknya perusahaan dan modal swasta. Persaingan jasa yang lebih besar dan kesesuaian keterampilan dengan lapangan pekerjaan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan di luar model yang hanya mengandalkan ekspor.

Peran ASEAN dengan kepemimpinan Filipina dalam menghadapi dinamika kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2026 memprioritaskan pencapaian ekonomi yang dinamis dan peningkatan pertumbuhan. Kesepakatan ini antara lain dijalankan melalui; Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital, pusat UMKM, dan peta jalan semikonduktor untuk meningkatkan integrasi. Filipina memajukan manajemen perdagangan, platform digital, dan pertumbuhan inklusif. Sementara itu di tengah transisi seperti di Myanmar, Thailand, dan Vietnam, China dan Australia telah melakukan peningkatan kemitraan strategis secara komprehensif.

Indonesia meluncurkan Rencana Induk Produktivitas Nasional (MPPN) 2025-2029, yang mengintegrasikan difusi teknologi, keterampilan tenaga kerja untuk transisi digital/hijau, pendalaman rantai nilai, peningkatan regulasi, dan pemantauan. Rencana Induk ini menargetkan pertumbuhan 8%, dengan kerangka 4-2-2, 4% dari tenaga kerja, 2% dari penanaman modal, dan 2% dari inovasi. Inisiatif Asian Productivity Organization (APO) mendukung bank data dan prospek produktivitas, menargetkan pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa. Koordinasi regional memastikan reformasi dapat menghasilkan pertumbuhan inklusif dan meningkatkan daya saing daya saing.

Langkah-langkah fiskal di kawasan Asia Timur dan Pasifik mendukung peningkatan produktivitas sektor swasta melalui insentif yang ditargetkan, prioritas pengeluaran, dan peningkatan efisiensi yang mendorong investasi dan inovasi. Ini termasuk pengurangan pajak untuk R&D, pengeluaran yang disederhanakan, dan kemitraan publik-swasta (PPP) untuk memobilisasi modal. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengalihkan sumber daya ke komponen yang dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi seperti digitalisasi dan teknologi hijau di tengah konsolidasi fiskal.

Insentif pajak regional, seperti pengurangan untuk pengeluaran R&D (misalnya, pengurangan super 150-400% di Singapura, Indonesia, dan Filipina), mengurangi biaya untuk peningkatan teknologi dan meringankan kendala pembiayaan bagi perusahaan. Insentif ini mendorong masuknya perusahaan berproduktivitas tinggi, penyebaran pengetahuan, dan peningkatan produktivitas faktor total (TFP), khususnya untuk perusahaan milik negara atau perusahaan yang terkendala di kawasan industri lama. Penyederhanaan pengeluaran pajak dan peningkatan administrasi lebih lanjut menyelaraskan pendapatan dengan perubahan struktural.

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pengeluaran fiskal untuk infrastruktur, adopsi kemajuan teknologi (utamanya AI, dan digitalisasi), dan dukungan untuk mendorong investasi swasta dalam revolusi digital dan hijau. Langkah-langkah seperti pembebasan bea cukai atau PPN dalam pengadaan peralatan R&D dan konsesi untuk transfer teknologi memperluas kapasitas sektor swasta.

Pembiayaan campuran, regulasi PPP, dan jaminan fiskal dalam meningkatkan modal swasta untuk proyek infrastruktur dan proyek ramah iklim. Pendalaman pasar modal lokal dan insentif menarik dana pensiun dan investasi ke dalam pembangunan berkelanjutan, merupakan Instrumen-instrumen yang dapat mewujudkan keberlanjutan fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi sektor swasta.

V. Posisi dan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidak pastian global

Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil sekitar 5% pada tahun 2025 meskipun terdapat ketidakpastian global seperti ketegangan perdagangan dan fluktuasi komoditas. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja terkuat di Asia Tenggara, melampaui banyak negara berpenghasilan menengah lainnya. Proyeksi menunjukkan ketahanan yang berkelanjutan hingga tahun 2026-2027, didorong oleh faktor-faktor domestik.

Indonesia mencapai pertumbuhan PDB sebesar 5,0% dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, mencapai 5,04% pada kuartal ketiga. Investasi dan ekspor mendorong pertumbuhan ini, sementara konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang moderat di tengah tekanan pasar tenaga kerja. Perkiraan dari Bank Dunia tetap stabil di angka 5% untuk tahun 2026, sementara target pemerintah mengharapkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 5,4-6%.

Konsumsi domestik yang kuat dan kelas menengah yang tumbuh telah mampu meredam guncangan eksternal. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, termasuk stimulus kredit dan insentif pajak UMKM, menjaga stabilitas dan menekan inflasi. Ekspor yang kuat, realisasi investasi dan kepemimpinan ekonomi digital di ASEAN semakin memperkuat daya redam terhadap guncangan eksternal.

Indonesia termasuk dalam 10 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB nominal, dengan pertumbuhan stabil 5% yang melebihi rata-rata pertumbuhan regional. Pasar domestik yang besar dan ekspor komoditasnya memberikan keunggulan kompetitif di tengah ketegangan geopolitik. Upaya transformasi digital memosisikannya untuk produktivitas yang lebih tinggi dan dominasi ASEAN.

Konsumsi rumah tangga tetap stabil di 53% dari PDB, dibantu oleh stimulus fiskal seperti pemberian uang tunai dan subsidi yang berjumlah triliunan rupiah. Pembentukan modal tetap bruto meningkat tajam, dengan investasi mesin naik 25,3% pada kuartal-kuartal awal, didorong oleh infrastruktur dan aktivitas sektor swasta. Ekspor melonjak 9,91% tahun-ke-tahun, dipimpin

oleh komoditas non-minyak/gas seperti minyak nabati dan baja, mengimbangi pertumbuhan impor.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Actual			WB projections		
Real GDP growth and inflation, percent change						
Real GDP	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2
Private Consumption	5.0	4.9	5.1	4.9	4.9	4.9
Government Consumption	-4.4	3.0	6.6	0.1	5.8	2.3
Gross Fixed Investment	3.9	3.8	4.6	6.1	6.2	6.3
Exports	16.2	1.3	6.5	7.0	5.6	6.9
Imports	15.0	-1.6	7.9	5.9	6.7	6.5
Consumer Price Inflation (average, %)	4.1	3.7	2.3	2.0	2.6	2.6
Fiscal accounts, central government, percent of GDP						
Revenues	13.5	13.3	12.8	11.6	11.8	12.2
of which Tax Revenue	10.4	10.3	10.1	9.4	9.7	10.1
Expenditures	15.8	14.9	15.1	14.4	14.6	15.1
Primary Balance	-0.4	0.5	-0.1	-0.5	-0.4	-0.5
Fiscal Balance	-2.4	-1.6	-2.3	-2.8	-2.8	-2.9
Central Government Debt	39.7	39.2	39.8	40.5	41.1	41.5
Balance of Payments, percent of GDP unless indicated otherwise						
Current Account Balance	1.0	-0.1	-0.6	-0.3	-1.1	-1.3
Exports, Goods and Services	23.9	21.2	21.5	22.0	22.1	22.1
Imports, Goods and Services	20.7	19.2	20.0	20.1	21.0	21.3
Net Foreign Direct Investment	1.4	1.1	1.0	1.1	1.2	1.5
Gross Reserves (months of imports of goods & services)	6.0	6.7	6.6	6.2	6.1	6.0
Memorandum items						
Nominal GDP (IDR trillion)	19,588	20,892	22,139	23,750	25,156	26,727
Nominal GDP growth	15.4	6.7	6.0	7.3	5.9	6.2

Gambar 6. Tabel Beberapa Indikator Ekonomi Makro Indonesia

Sumber: World Bank, 2025

Sektor manufaktur tumbuh 5,54%, memberikan kontribusi terbesar (1,13 poin persentase) bersama dengan perdagangan (5,49%) dan pertanian (4,93%). Keempat sektor ini (manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi) menyumbang 65% dari PDB. Sektor jasa seperti pendidikan (10,59%) dan jasa bisnis (9,94%) mengalami pertumbuhan tercepat, didorong oleh siklus akademik dan pemulihan pariwisata.

Investasi hilir di bidang pertambangan, energi, dan komoditas melonjak 5 poin menjadi 30% dari total investasi, menciptakan lapangan kerja dan nilai ekspor. Inisiatif pemerintah, termasuk dana kekayaan negara Danantara dan reformasi digital, meningkatkan produktivitas dan kredit swasta. Upaya-upaya ini mengurangi risiko seperti volatilitas komoditas, untuk mempertahankan pertumbuhan di atas 5%.

Pertanian, perdagangan, dan manufaktur memimpin penciptaan lapangan kerja di Indonesia hingga tahun 2025, menyerap sebagian besar tenaga kerja dan mendorong peningkatan lapangan kerja bersih. Sektor ekonomi kreatif juga melampaui target, mempekerjakan 27,4 juta pekerja atau 18,7% dari total tenaga kerja. Akomodasi dan jasa makanan menambahkan jumlah yang signifikan, mencerminkan pemulihan pariwisata.

Pertanian menyumbang 28,15% dari total lapangan kerja pada Agustus 2025, bertambah 0,49 juta pekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Perdagangan menyumbang 18,73% dan manufaktur 13,86%, dengan manufaktur menambah 0,30 juta lapangan kerja. Sektor-sektor ini,

ditambah akomodasi/makanan (naik 0,42 juta), mendominasi di tengah pertumbuhan angkatan kerja secara keseluruhan menjadi 146,54 juta.

Upah minimum naik 6,5% secara nasional pada tahun 2025, rata-rata Rp 3.320.000 (sekitar USD 213), dengan Jakarta sebesar Rp 5,4 juta dan Jawa Tengah terendah sebesar Rp 2,17 juta. Meskipun terjadi kenaikan nominal, upah riil menurun 1,1% setiap tahun sejak 2018 karena inflasi dan pekerjaan bernilai rendah. Pekerja upah tumbuh menjadi 38,74% dari lapangan kerja (naik 0,65 juta), meningkatkan pangsa sektor formal menjadi 42,2%.

Indonesia tetap cukup rentan terhadap guncangan harga komoditas global karena ketergantungan yang tinggi pada ekspor seperti batubara, minyak sawit, nikel, dan timah, yang membuatnya rentan terhadap volatilitas harga dan gangguan perdagangan. Meskipun upaya diversifikasi dan permintaan domestik memberikan penyangga, penurunan harga batubara dan energi pada tahun 2025-2026 dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan rupiah. Pengolahan hilir telah mengurangi beberapa risiko, tetapi faktor eksternal seperti tarif AS dan perlambatan ekonomi China memperbesar risiko tersebut.

Komoditas mendominasi ekspor, dengan batubara, minyak sawit mentah (CPO), besi/baja, dan nikel menghadapi tekanan penurunan akibat kelebihan pasokan dan lemahnya permintaan global. Pada tahun 2025, penurunan harga komoditas berkontribusi pada defisit transaksi berjalan sebesar 0,8% dari PDB pada kuartal-kuartal awal, yang diproyeksikan mencapai 1,4% pada tahun 2026 jika tren berlanjut. Guncangan pasokan timah akibat penindakan pertambangan menyoroti risiko volatilitas yang meningkat untuk logam tertentu.

Konsumsi domestik yang kuat (52,7% dari PDB) dan investasi (31%) meredam guncangan, mempertahankan pertumbuhan 5% meskipun kontribusi ekspor bersih negatif. Disiplin fiskal, cadangan yang mencakup 6,1 bulan impor, dan kebijakan seperti setoran wajib pendapatan ekspor menstabilkan perekonomian. Pengalihan produksi ke hilir dalam nikel dan logam telah meningkatkan nilai pengolahan (+13,3% pertumbuhan), mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku.

Depresiasi rupiah memperburuk biaya impor selama lonjakan harga energi, mempersempit surplus perdagangan seperti yang terlihat pada tahun 2022. Potensi tarif timbal balik AS terhadap komoditas (9,9% dari ekspor ke AS) dapat memangkas PDB sebesar 0,3 poin persentase per kenaikan 10%. Dominasi impor Tiongkok (36,4%) dan melambatnya permintaan meningkatkan kerentanan gesekan perdagangan.

Bank Indonesia mempertahankan inflasi dalam target $2,5 \pm 1\%$ melalui kebijakan moneter akomodatif, termasuk pemotongan Suku Bunga BI menjadi 4,75% dan ekspansi likuiditas, sementara langkah-langkah fiskal seperti subsidi dan pengeluaran yang ditargetkan mengendalikan harga pangan dan energi. Upaya terkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mengelola inflasi pangan yang bergejolak secara efektif. Kebijakan-kebijakan ini menstabilkan ekspektasi, menekan inflasi inti di sekitar 2,2%, dan memastikan CPI tetap rendah di kisaran 2,3-2,9% hingga tahun 2025.

Penurunan suku bunga BI sebesar 150 bps sejak akhir tahun 2024 menurunkan biaya pinjaman dan mendukung pertumbuhan tanpa menyebabkan perekonomian terlalu panas. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KILM) mengalokasikan triliunan insentif kepada bank untuk pemberian pinjaman prioritas, melonggarkan likuiditas dan transmisi ke penurunan suku bunga deposito atau pinjaman. Stabilisasi rupiah melalui intervensi dan pembelian SBN mencegah inflasi impor.

Subsidi pemerintah untuk bahan bakar, listrik, dan pupuk menstabilkan harga yang diatur, berkontribusi pada inflasi yang rendah pada tingkat 1,0-1,1%. Bantuan sosial, transfer tunai, dan paket kebijakan ekonomi meningkatkan konsumsi tanpa tekanan permintaan berlebih. Disiplin anggaran dan sinergi dengan BI memastikan ekspansi fiskal selaras dengan target inflasi.

Sinergi TPIP/TPID meningkatkan manajemen pasokan pangan regional, menekan lonjakan inflasi VF dari faktor musiman seperti beras dan cabai. Digitalisasi mengurangi inflasi inti dengan meningkatkan efisiensi dan persaingan. Hal ini membuat CPI utama tetap berada di angka 2,65% pada September 2025, dengan proyeksi yang tetap stabil hingga tahun 2026.

VI. Penutup

Ke depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tangguh dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5% yang didorong oleh investasi, hilirisasi, digitalisasi, dan transisi energi hijau. Meskipun tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan isu lingkungan tetap ada, yang harus diatasi melalui reformasi kebijakan dan peningkatan SDM masyarakat dan aparatur negara.

Pertumbuhan PDB yang konsisten dan stabilitas makro menjadi modal kuat di tengah gejolak global. Pasar domestik yang besar dan bonus demografi menjadi daya tarik bagi investasi. Selain itu program-program; hilirisasi berbagai komoditi baik sumber daya alam maupun hasil pertanian dan perkebunan serta kelautan, pengembangan kendaraan listrik, dan semikonduktor akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Indonesia yang berada pada jalur transit utama dunia dapat meningkatkan peran ekonomi global. Secara global, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS memperluas akses pasar dan memperkuat posisi global. Selanjutnya kemajuan teknologi terutama digital dan AI perlu segera diadopsi dengan kebijakan yang mempermudah akses, menjaga keamanan penggunaan dan membangun infrastruktur digital yang dibutuhkan, Komitmen dan konsistensi pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

Tantangan dan strategi yang akan dihadapi dan harus disiapkan oleh Indonesia menyangkut ketidakpastian global seperti; perang dagang, inflasi, dan perlambatan ekonomi global. Tekanan global terkait isu iklim mendorong adaptasi kebijakan lingkungan dan kebijakan serta upaya penurunan emisi. Dorongan transisi ke energi terbarukan menjadi bagian penting dari strategi ekonomi masa depan.

Secara keseluruhan, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk memanfaatkan peluang global melalui inovasi, reformasi, dan kepemimpinan yang adaptif, meskipun perlu terus mewaspadaikan dan mengelola tantangan yang ada, terutama dari sisi global. Indonesia berada di persimpangan penting, dengan potensi pertumbuhan solid didukung pasar domestik dan reformasi internal, tetapi perlu mengatasi tantangan struktural seperti kesenjangan dan tuntutan transisi energi di tengah ketidakpastian global.

Dengan demikian kebijakan di tahun 2026, untuk di dalam negeri seyogyanya di prioritaskan pada pembuatan dan penegakkan kebijakan fiskal yang konsisten. Kebijakan fiskal harus bersifat sederhana, mudah diterapkan dan ditegakkan, namun tetap fleksibel. Kebijakan fiskal harus pula dibarengi dengan berbagai kebijakan lainnya yang menyangkut; kemudahan investasi, tata ruang dan pertanahan, pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik lainnya, serta kebijakan lingkungan hidup dan energi terbarukan.

Di tingkat global dan regional, berbagai perjanjian dan kesepakatan baik bilateral maupun multilateral harus senantiasa dikaji dan ditelaah ulang untuk mengantisipasi berbagai perubahan konstelasi yang berkembang dengan pesat. Fenomena multipolar dan kebijakan luar negeri tanpa

etika yang diterapkan Amerika Serikat harus menjadi perhatian yang serius. Selain itu Kementerian Luar Negeri selaku instansi resmi dalam pembuatan berbagai perjanjian luar negeri, harus selalu mensosialisasikan substansi perjanjian, kepada seluruh masyarakat terutama kepada sektor swasta selaku pelaku ekonomi, sehingga substansi perjanjian tersebut dapat ditindak lanjuti dan menguntungkan berbagai pihak di Indonesia.

Referensi

- Baldwin, R. (2023) *Globalization and trade in a fragmenting world*. Oxford: Oxford University Press.
- Bank Indonesia, (2025), *Tinjauan Kebijakan Moneter, Desember 2025*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bappenas, (2025), *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia, Triwulan II, Tahun 2025*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Budiman, Bedi, Hutama, M Rizky Ganda, Nordian, Siti Intan, Abdullah, Wong, (2025), *Indonesia's Geopolitical and Economic Projections Amidst Quad Dynamics in the Indo-Pacific*, *International Journal of Economics Development Research*, Volume 6(1), 2025, pp. 384-392.
- Dalby, Simon and Tuathail, Gear, (1996), *The Critical Geopolitics Constellation: Problematizing Fusions of Geographical Knowledge and Power*, *Political Geography*. Vol 15, No. 6/7, pp. 451-456.
- Davidovich, Toloraya Georgiy and Olegovna, Gorbacheva Valerya, (2018) *Geopolitical Configurations in ASIA*, *Communication and Public Diplomacy*, September 2018, Vol. 1, No. 1, 89-97
- Duff, Robbie, (2025), *The Return of the Tripolar World: Economic and Political Realignments in 2025*, Atlas Institute for International Affairs.
- Drine, Imed, (2025), *Geopolitical Risk, Fragmentation, and Confidence Navigating a New Economic Reality*, Islamic Development Bank (IsDB).
- Eichengreen, B. (2023) *The future of the dollar in a multipolar world*. Princeton: Princeton University Press.
- European Council (n.d.) 'How much are EU member states spending on defence?', European Council.
- Goldman Sachs Research,(2025),*The Global Economy Is Forecast to Post 'Sturdy' Growth of 2.8% in 2026*.
- Howorth, J. (2023) 'European defense strategies in a changing global order', *International Affairs*, 99(3), pp. 567-590.
- Huang, Y. and Wang, Z. (2023) 'China's economic expansion and resource diplomacy', *Asian Economic Policy Review*, 18(2), pp. 245-267.
- International Monetary Fund (IMF), (2023), *Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multilateralism*, IMF Staff Discussion Notes, IMF Washington, DC.
- International Monetary Fund (IMF), (2025), *World Economic Outlook: Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim*, IMF Washington, DC.
- Jones, E. and Verdun, A. (2023) 'EU strategic autonomy and the challenges of globalization',

- Journal of European Public Policy, 30(1), pp. 101-120.
- Newman, E., and Visoka, G. (2023). The Geopolitics of State Recognition in a Transitional International Order. *Geopolitics*, 28(1), 364–391.
- Mehta, A. (2025) 'UK orders \$2 billion worth of air defense missiles for Ukraine', *Defense News*, 3 March.
- OECD (2024), *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2025), *OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2: Resilient Growth but with Increasing Fragilities*, OECD Publishing, Paris.
- Pearl, M., Sergi, B. S., & Muszynski, R. J., III. (2025). Shifting Equilibria: A New Framework Assessing Changing Power Dynamics Between the Global North and Global South. *World* 6, no. 1: 34.
- Powers and Regional Integration, *Baku Dialogues Policy Perspectives on The Silk Road Region*, Vol. 6 | No. 3 | Spring 2023.
- Rachman, Valhan Hamdiana, (2022), *Geopolitics: Dynamics and Development of Indonesia's Maritime Axis*, *Jurnal Ekonomi*, Volume 11, No 03, 2022
- Rodrik, D. (2022) *The political economy of trade and industrial policy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Romaniuk ,Scott N. and Csicsmann, Laszlo, (2025), *Constellations of Power: Smart Dragon-3 and the Geopolitics of China's Space Strategy*, Spacedaily.
- Saxer, Marc, (2024), *The Indo-Pacific and its Emergence as a Global Powerhouse*, *Internationale Politik Quarterly*, Nov 19, 2024
- Suradinata, Ermaya, (2005), *Basic Laws of Geopolitics and Geostrategy within the Framework of the Integrity of the Republic of Indonesia*, Jakarta: Suara Bebas Unkauf, Urs, (2023), *Between Global*
- Szalai, Máté, (2025), *Smaller Gulf States and Competing Geopolitical Scripts in the Indo-Pacific*, *International Politics*, 2025.
- Word Bank, (2025), *East Asia and Pacific (EAP) Economic Update, October 2025*, Washington, DC.
- Word Bank, (2025), *The Indonesia Economic Prospects (IEP)*, December 2025, Washington, DC.
- Word Bank, (2026), *Global Economic Prospects (GEP)*, January 2026, Washington, DC.
- Yuniar, Resty Woro, (2026), *Indonesia Eyes 6% Growth in 2026 Despite a Jobs 'Time Bomb'*, myNEWS, SCMP, Hongkong.
- Zaedun, (2012), *Universal Theory of Geopolitics*, Faculty of Law, Pattimura University, Ambon.
- Zeng, J. and Breslin, S. (2024) 'Digital currencies and the global financial order: The case of China's digital yuan', *Global Policy Journal*, 15(1), pp. 88-106.